

Kerja Sama Militer Brunei Darussalam-Inggris dan Dampaknya terhadap Stabilitas Regional Asia Tenggara

Aflah Zahratsabitha Irwan^{1*}, Imam Fadhil Nugraha²

¹⁻²Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Korespondensi penulis: aflahh.zahraaa@gmail.com*

Abstract. *This paper examines the military cooperation between Brunei Darussalam and the United Kingdom, as well as its impact on regional stability in Southeast Asia, focusing on Brunei's non-alignment strategy as a small state. Using a descriptive analytic method based on a literature review, this paper explores descriptive data on the dynamics of Brunei's foreign policy strategy in building bilateral relations, the role of the UK post-Brexit through the Global Britain strategy in strengthening bilateral relations with ASEAN member countries, and the implementation of Brunei and British military cooperation in maintaining regional security stability through the presence of British Forces Brunei since 1963. This is supported by historical ties and the Garrison Agreement to strengthen the security of the country and the region without confrontation. Therefore, this paper shows that Brunei has managed to balance military cooperation with the UK and economic cooperation with China in the midst of great power rivalries and tensions over the South China Sea dispute, as well as its implications for regional stability.*

Keywords: *Brunei Darussalam, Military Cooperation, Regional Stability, Southeast Asia, United Kingdom.*

Abstrak. Tulisan ini mengkaji mengenai kerja sama militer antara Brunei Darussalam dan Inggris, serta dampaknya terhadap stabilitas regional di Asia Tenggara, dengan fokus pada strategi *non-alignment* Brunei sebagai negara kecil. Menggunakan metode deskriptif analitik berbasis kajian literatur, tulisan ini mengeksplor data secara deskriptif mengenai dinamika strategi kebijakan luar negeri Brunei dalam membangun hubungan bilateral, peran Inggris pasca-Brexit melalui strategi *Global Britain* dalam memperkuat hubungan bilateral dengan negara anggota ASEAN, dan implementasi kerja sama militer Brunei-Inggris dalam menjaga stabilitas keamanan regional melalui kehadiran *British Forces Brunei* sejak tahun 1963. Hal tersebut didukung dengan hubungan historis dan *Garrison Agreement* untuk memperkuat keamanan negara dan kawasan tanpa konfrontatif. Oleh karena itu, tulisan ini menunjukkan Brunei berhasil menyeimbangkan kerja sama militer dengan Inggris dan kerja sama ekonomi dengan China di tengah rivalitas kekuatan besar dan ketegangan sengketa Laut China Selatan, serta implikasinya terhadap stabilitas regional.

Kata kunci: Kerja Sama Militer, Brunei Darussalam, Inggris, Stabilitas Regional, Asia Tenggara

1. LATAR BELAKANG

Tulisan ini akan menganalisis bentuk implementasi kerja sama militer dari negara kecil seperti Brunei Darussalam dengan Inggris yang telah lama menjadi negara mitra khususnya dalam bidang pertahanan, serta dampaknya terhadap stabilitas regional di Asia Tenggara. Hubungan kerja sama militer yang telah terlaksana sejak awal kemerdekaan Brunei ini menjadi bentuk kemitraan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan, khususnya dalam menghadapi dinamika keamanan kawasan. Dengan mengkaji hubungan kerja sama militer kedua negara melalui tulisan ini, dapat memberikan kontribusi positif terhadap kajian hubungan internasional dan kebijakan luar negeri suatu negara, khususnya dalam memahami peran Brunei Darussalam sebagai negara kecil dalam menjalin

kemitraan pertahanan dan dampaknya terhadap keseimbangan kekuatan serta stabilitas kawasan di tengah rivalitas negara-negara kekuatan besar.

Asia Tenggara merupakan suatu kawasan yang memiliki posisi strategis dan penting dalam dinamika geopolitik global. Kawasan ini menjadi jalur penting perdagangan internasional dan arena persaingan antara dua negara kekuatan besar dunia, yaitu Amerika Serikat dan China. Dalam beberapa tahun terakhir, konflik internal antarnegara dalam kawasan ini tidak lagi menjadi isu utama, melainkan mengenai ancaman terhadap stabilitas kawasan yang berada di Laut Cina Selatan, serta berbagai ancaman non-tradisional (Venkatachalam & dkk., 2022, p. 2). Stabilitas kawasan khususnya di Asia Tenggara sangat dipengaruhi oleh respons dan kemampuan suatu negara dalam melaksanakan kerja sama bilateral dengan hati-hati dan strategis. Stabilitas kawasan menjadi suatu ketentuan dalam mendukung pembangunan negara-negara Asia Tenggara dalam berbagai aspek.

Dalam era globalisasi dan perubahan geopolitik yang meningkat, menjaga stabilitas kawasan dapat menjadi kunci dalam mencegah konflik besar dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Febrina & dkk., 2024, p. 1). Hal tersebut menunjukkan pentingnya strategi kerja sama dan kemitraan dalam bidang pertahanan sebagai bagian dari kebijakan luar negeri, terutama bagi negara-negara kecil (*small states*) salah satunya yaitu Brunei Darussalam. Brunei menjadi salah satu contoh dari negara kecil yang berhasil menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional melalui strategi yang tidak umum di antara sesama anggota organisasi regional Asia Tenggara yaitu *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).

Bentuk implementasi strategi kerja sama Brunei tidak terlepas dari hubungan historisnya dengan Inggris sejak meraih kemerdekaannya pada tahun 1984. Pengaruh Inggris tetap berdampak signifikan di hampir segala aspek kehidupan di Brunei, hal tersebut juga mendorong eratnya hubungan antar kedua negara dalam berbagai bidang khususnya dalam keamanan negaranya melalui kerja sama militer (Bandial, 2017). Hubungan erat Brunei dan Inggris, terutama di bidang pertahanan, menjadi bagian penting dari strategi keamanan Brunei dalam menghadapi tantangan eksternal. Selain menjadi negara kecil dan lemah dalam sengketa Laut Cina Selatan, Brunei memiliki keterbatasan dalam menghadapi meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China, serta peran ASEAN yang kurang efektif dalam menangani isu-isu terkait sengketa wilayah yang berbatasan langsung dengan kedaulatan Kesultanan Brunei. Namun demikian, berkat cadangan finansial, politik, dan diplomatik yang telah terbangun dalam jangka panjang, Brunei berhasil mempertahankan stabilitas sosial, politik, dan diplomatik yang relatif kuat

di tengah situasi tersebut. Dalam merespons tantangan ekonomi dan diplomasi, Brunei Darussalam berupaya memperkuat hubungan dan aset yang sudah ada serta melakukan diversifikasi ekonomi (Roberts, 2016, p. 95).

Selain itu, Brunei juga aktif mempererat hubungan dengan China untuk memperluas peluang ekonomi dan memperkuat posisinya di tengah dinamika kawasan. Walaupun China kini menjadi investor terbesar di Brunei, namun Brunei tetap menjalankan kebijakan luar negeri yang pragmatis dan terbuka dengan berbagai mitra global. Dalam konteks tersebut, Brunei Darussalam menunjukkan bagaimana negara kecil yang mampu menjaga stabilitas keamanannya melalui strategi kerja sama militer dengan negara besar seperti Inggris, sembari tetap menjalin hubungan baik dengan kekuatan lain seperti China (Druce, 2019, p. 148). Sebagai negara kecil, Brunei Darussalam menerapkan strategi luar negeri yang berlandaskan prinsip *non-alignment*, tetapi tetap menjalin kemitraan strategis, salah satunya melalui kerja sama militer dengan Inggris. Kemitraan ini tidak hanya bertujuan memperkuat pertahanan nasional Brunei, tetapi juga mencerminkan upayanya menjaga stabilitas kawasan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Melalui strategi tersebut, Brunei juga membuka peluang untuk bekerja sama dengan negara lain seperti China dalam aspek ekonomi, sebagai bentuk *hedging* dalam upaya menjaga stabilitas regional.

Dengan meninjau dinamika kerja sama bilateral melalui pespektif *small states*, tulisan ini menyoroti bagaimana negara-negara kecil seperti Brunei Darussalam mengandalkan diplomasi dan manuver strategis dalam mempertahankan kedaulatan negaranya di tengah rivalitas kekuatan besar. Sebagai kesepakatan posisi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Brunei dengan strategi *non-alignment* mencerminkan pendekatan tidak konfrontatif atau tanpa secara langsung menentang kekuatan besar mana pun dalam menjaga stabilitas negara danawasannya. Oleh karena itu, kajian terhadap kerja sama militer Brunei-Inggris menjadi penting, khususnya dalam perspektif pendekatan *small states* untuk memahami bagaimana kebijakan luar negeri seperti Brunei berkontribusi terhadap stabilitas kawasan. Tulisan ini akan membahas strategi *non-alignment* Brunei sebagai negara kecil, peran Inggris pasca-Brexit di Asia Tenggara, serta implementasi kerja sama militer kedua negara dalam konteks peran negara kecil di lingkungan regional yang dinamis.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian mengenai kerja sama militer Brunei Darussalam dan Inggris, serta dampaknya terhadap stabilitas regional kawasan Asia Tenggara ini akan dikaji melalui pendekatan *small states*. Pemikiran ini merupakan sebuah perspektif dari negara-negara kecil yang beragam dalam hal ukuran, populasi, ekonomi, sumber daya alam, dan tingkat kerentanannya. Berdasarkan dari *Forum of Small States* (FOSS) di PBB, jumlah penduduk negara anggotanya sekitar kurang lebih dari 10.000 hingga lebih dari 10 juta jiwa. Selain itu, *World Bank* dan *Commonwealth* menggunakan ambang batas perkiraan 1,5 juta penduduk untuk menghitung suatu negara tergolong sebagai negara kecil. Kategori tersebut mencakup negara maju dan berkembang, yang kaya maupun miskin sumber daya, serta negara kepulauan maupun terkurung daratan (Súilleabháin, 2014, p. 3). Selain itu, negara-negara kecil memiliki peran krusial dalam menegakkan hukum internasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan tantangan global. Tujuannya untuk mendukung kerja sama secara bilateral dan multilateral, maupun terlibat dalam lembaga-lembaga tatanan global, serta mematuhi tujuan dan prinsip Piagam PBB.

Secara wilayah, ukuran negara yang kecil membuat kerja sama menjadi pilar utama dalam kebijakan luar negeri mereka. Dengan keterbatasan kekuatan militer dan ekonomi, negara kecil sangat bergantung pada kerja sama internasional berbasis aturan untuk menjamin keamanan dan pembangunan mereka. Hal tersebut memungkinkan negara-negara kecil memberikan kontribusi signifikan terhadap tata kelola global (Lupel, 2024, p. 2). Konsep “*Small States*” dan “*Great Powers*” adalah konsep ideal dengan karakteristik yang berbeda dalam hubungan internasional. Meski sering dianggap lemah dan pasif, negara kecil dalam sistem penyangga (*buffer system*) dapat berperan strategis sebagai poros yang mengurangi konflik antar kekuatan besar melalui strategi *hedging*, yaitu menyeimbangkan, beraliansi, cenderung netral, serta menjaga hubungan baik dengan beberapa negara kekuatan besar secara fleksibel (Efremova, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik, yang berfokus pada kajian literatur (*literature review*). Metode ini bertujuan untuk mengkaji data secara deskriptif untuk diolah dengan memberikan gambaran yang komprehensif tentang strategi *non-alignment* Brunei dalam melaksanakan hubungan kerja sama militer dengan Inggris dalam bidang militer, serta implikasinya terhadap stabilitas regional. Penelitian ini melakukan pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka

yang meliputi artikel jurnal ilmiah, laporan dan berita internasional yang kredibel, serta dokumen resmi dari lembaga regional yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik, penelitian ini mengolah temuan dari berbagai sumber dan perspektif untuk mengkaji pemahaman mengenai bagaimana kerja sama militer kedua negara tersebut mencerminkan strategi luar negeri Brunei sebagai *small state* dalam membangun hubungan bilateral dengan negara besar, serta implikasinya terhadap stabilitas keamanan regional di Asia Tenggara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis dinamika hubungan bilateral Brunei Darussalam dan Inggris pasca-Brexit dalam aspek pertahanan militer, penting untuk memahami konteks kebijakan luar negeri Brunei beserta negara-negara Asia Tenggara lainnya yang bersifat netral dan pragmatis, serta pengaruh historis Inggris sebagai negara mitra sejak awal kemerdekaan. Tulisan ini mengkaji mengenai bagaimana kerja sama kedua negara mencerminkan kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas regional, khususnya di kawasan Asia Tenggara di tengah rivalitas dan isu geopolitik global. Melalui pendekatan *non-alignment* yang konsisten, Brunei sebagai negara kecil mampu menjaga hubungan kerja sama yang baik dengan berbagai negara kekuatan besar termasuk Inggris dalam aspek pertahanan, serta China dalam aspek ekonomi.

Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa negara kecil dapat berperan sebagai stabilisator regional tanpa mengorbankan kedaulatan atau independensi politiknya. Oleh karena itu, melalui penelitian ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai bagaimana strategi *non-alignment* dari negara kecil seperti Brunei Darussalam dan kontribusinya terhadap stabilitas regional di Asia Tenggara, dan peran negara mitra yaitu Inggris pasca-Brexit dan fokusnya dalam meningkatkan hubungan kerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN, serta bentuk implementasi dari kerja sama bidang militer oleh Brunei-Inggris guna meningkatkan kapasitas dan kualitas keamanan negara dan implikasinya terhadap kawasan.

Strategi *Non-Alignment* Brunei dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Regional

Sebagai salah satu negara kecil di Asia Tenggara, dengan populasi kurang lebih dari 455.000 penduduk (tahun 2024) dan luas wilayah 2.226 mil persegi, Brunei Darussalam berupaya menjaga stabilitas kawasan dengan menerapkan kebijakan luar negerinya secara cermat di tengah persaingan kekuatan besar (Department of Economic

Planning and Statistics, 2024). Pasca Perang Dingin, negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Brunei, berusaha menghindari keberpihakan terhadap blok besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet. Melalui hal tersebut, negara-negara Asia Tenggara yang juga tergabung dalam organisasi regional ASEAN menerapkan strategi *non-alignment* dengan tidak terlibat pada blok politik atau militer tertentu yang berlawanan tetapi tetap memberikan ruang untuk memperkuat peran diplomatik kawasan secara kolektif tanpa harus terseret dalam konflik global. Dalam menghadapi dinamika politik kekuatan besar saat ini, Brunei melalui peran aktifnya di ASEAN juga mendukung konsep *omni-enmeshment*, yaitu konsep yang diterapkan negara-negara kawasan Asia Tenggara dalam menghadapi politik kekuatan besar dengan menjalin keterlibatan menyeluruh melalui hubungan kerja sama yang berkelanjutan untuk menjaga stabilitas regional. Meski memiliki hubungan historis dan kemitraan pertahanan dengan Inggris sejak awal kemerdekaan, Brunei tetap pragmatis dengan memperkuat kerja sama ekonomi dengan China, sembari mendukung strategi damai ASEAN (Putra, 2020, p. 5).

Brunei, sebagai negara kecil dengan kapasitas militer yang relatif terbatas dan ekonomi yang berskala kecil, menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan kedaulatan dan kebijakan luar negeri di tengah persaingan negara kekuatan besar. Oleh karena itu, Brunei secara konsisten menerapkan strategi *hedging* untuk menyeimbangkan hubungan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai aktor besar tanpa terikat dalam satu poros kekuatan tertentu. Melalui diversifikasi hubungan luar negeri, Brunei tidak hanya melanjutkan hubungannya dengan negara-negara Barat seperti Inggris dan Amerika Serikat, tetapi juga meningkatkan keterlibatan strategis dengan negara-negara Asia Timur seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Hal tersebut dilakukan sebagai mekanisme perlindungan bagi Brunei untuk tetap memiliki ruang manuver dalam pengambilan keputusan luar negeri, serta mempertegas peran Brunei sebagai negara kecil yang dapat memainkan strategi adaptif di tengah kompleksitas hubungan antarnegara (Izzudin, 2021, p. 63).

Brunei telah menjalin kerja sama dalam bidang pertahanan dengan Inggris karena adanya kombinasi hubungan historis yang kuat, skala ekonomi yang relatif kecil, posisi geopolitik yang tidak konfrontatif, dan sistem pemerintahan terpusat atau monarki absolut. Hal ini ditandai dengan keberadaan pasukan *British Force Brunei* (BFB) dan Batalion *Royal Gurkha Rifles*, serta pembaruan *Garrison Agreement* pada Desember 2024 yang diperbarui setiap lima tahun atas permintaan Sultan Hassanal Bolkiah (Prime Minister's Office, 2024). Sebagai negara Asia Tenggara yang tergabung dalam *Non-Aligned*

Movement (NAM), Brunei tetap mempertahankan strategi tersebut meskipun menjalin hubungan kerja sama dan menjadi tuan rumah dari pangkalan militer negara Barat seperti Inggris, selama kerja sama tersebut bersifat bilateral, transparan, dan tidak membentuk aliansi militer permanen untuk melawan negara-negara Timur yang dapat memicu konflik (Graham, 2024).

Hubungan bilateral dengan Inggris dapat memberikan perlindungan dan keamanan negara, dan di saat yang bersamaan, upaya pertumbuhan ekonomi Brunei ditingkatkan melalui kerja sama dengan China. Salah satu strategi Kesultanan Brunei dalam mengejar tujuan-tujuan pengembangan ekonomi negaranya melalui Wawasan Brunei 2035 (*Brunei Vision 2035*) dengan menarik *Foreign Direct Investment* (FDI). Hal tersebut bertujuan untuk mengembangkan industri non-migas, mendorong pertumbuhan pasar, dan penciptaan lapangan kerja. Sejalan dengan hal tersebut, China memperkuat hubungan ekonomi yang signifikan dengan Brunei sebagai mitra dagang terbesar dan investor utama, melalui *Belt and Road Initiative* (BRI) yang mulai terlaksana tahun 2013, di mana China membangun infrastruktur secara besar-besaran di negara yang berkembang, khususnya yang rentan secara politik, dengan menggunakan instrumen keuangan (Lim & dkk., 2023, p. 243).

Sebagai contoh konkret dalam pembangunan infrastruktur yaitu Jembatan Temburong yang dibangun oleh *China State Construction Engineering Corporation*, serta proyek investasi melalui *Hengyi Petrochemical Company* China dalam melanjutkan proyek kilang minyak dan industri petrokimia lainnya di Pulau Muara Besar yang sejalan dengan peningkatan Pelabuhan Muara, yaitu pelabuhan terbesar di wilayah Laut China Selatan (Asia Pacific Foundation of Canada, 2020). China secara bertahap meningkatkan kehadirannya di lanskap ekonomi Brunei dan berkontribusi dalam pertumbuhan negara kecil tersebut.

Brunei Darussalam, sebagai negara kecil yang memiliki letak strategis di Asia Tenggara, menunjukkan komitmennya melalui strategi *non-alignment* dengan mempertahankan hubungan kerja sama dengan dua kekuatan global yang saling bersaing yaitu Inggris dan China. Negara-negara Asia Tenggara lainnya sulit untuk meniru strategi Brunei yang dapat menjadi tuan rumah pangkalan militer Inggris dan tetap mempertahankan hubungan ekonomi erat dengan China, karena faktor perbedaan secara historis, geopolitik, dan sistem pemerintahan. Sebagai negara kecil dengan klaim minim di Laut China Selatan, Brunei dapat berperan netral dan tanpa memicu ketegangan. Di samping itu, negara seperti Filipina dan Malaysia, yang secara tegas mengklaim teritorial

di Laut China Selatan dan ketergantungan militer dengan Amerika Serikat, menghadapi risiko konfrontasi dengan China jika memiliki pangkalan militer Barat.

Oleh karena itu, kerja sama strategis Brunei dengan dua negara kekuatan besar ini memberikan dampak yang positif dengan mendukung stabilitas nasional dan regional melalui pendekatan non-konfrontatif, serta secara tidak langsung menghindari keterlibatan dalam konflik atau rivalitas kekuatan besar. Namun, secara jangka panjang, kebijakan luar negeri Brunei ini dapat memicu ketidakselarasan dengan negara-negara ASEAN lain yang rentan terhadap tekanan geopolitik. Melalui hal ini, Brunei juga perlu memperhatikan langkah yang bijak dalam membangun hubungan dengan negara-negara kekuatan besar sembari menjaga komunikasi erat dengan negara-negara anggota ASEAN agar tidak menimbulkan kesan ketidakpatuhan terhadap kepentingan kolektif, dan tetap menjaga stabilitas keamanan regional di Asia Tenggara.

Peran Inggris Pasca-Brexit dan Keterkaitannya dengan Kawasan Asia Tenggara

Sejak Referendum Brexit tahun 2016, Inggris menjalankan strategi kebijakan luar negeri "*Global Britain*" untuk mempertahankan peran globalnya dan memperkuat hubungan perdagangan yang sudah ada. Melalui strategi tersebut, posisi Inggris di panggung internasional pasca-Brexit, mendorong negara tersebut memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian kepentingan global Inggris. Kawasan ini menjadi titik temu berbagai tren utama dalam hubungan internasional, seperti pergeseran pusat gravitasi ekonomi dunia ke Indo-Pasifik, kemunculan China sebagai kekuatan besar beserta tantangan serta peluang yang ditawarkannya, meningkatnya rivalitas antar kekuatan besar khususnya antara Amerika Serikat dan China, melemahnya tatanan internasional berbasis aturan, meningkatnya ancaman keamanan maritim, percepatan inovasi teknologi, serta krisis iklim yang semakin mengancam eksistensi global (Storey, 2021).

Setelah keluar dari keanggotaan Uni Eropa, Inggris memperkuat hubungannya dengan Asia Tenggara untuk mengimbangi tantangan dalam hubungan ekonomi dan perdagangannya dengan Uni Eropa, serta kebangkitan China dalam menggeser kekuatan global ke arah Timur. Sebagai negara yang pernah menjadi penjajah di kawasan Asia Tenggara, tentunya kepentingan Inggris sudah sangat luas dalam berbagai aspek, khususnya dalam hubungan kerja sama di bidang pertahanan, pendidikan, investasi dan perdagangan, serta mempromosikan nilai-nilai inklusif dan demokrasi (Haacke & Breen,

2020). Melalui hal tersebut, negara-negara anggota ASEAN memandang kehadiran Inggris dapat menjadi bentuk dalam menyeimbangkan kekuatan regional, mengurangi ketegangan dalam persaingan geopolitik kedua negara kekuatan besar dan sengketa Laut China Selatan. Hubungan kerja sama ini juga dapat menjadi opsi alternatif kawasan agar tidak terlalu bergantung dengan Amerika Serikat atau China (Kuok, 2021).

Inggris memiliki peran yang signifikan sebagai aktor keamanan di kawasan Asia Tenggara melalui keterlibatan pertahanan dengan negara-negara anggota ASEAN, mulai dari latihan militer, serta kerja sama keamanan kolektif melalui *Five Power Defence Arrangements* (FPDA) yang melibatkan dan Inggris, Malaysia, Singapura, Australia, dan Selandia Baru. Dalam hal ini, Inggris setiap tahun mengirimkan pasukan dan aset militer ke *Integrated Area Defence Headquarters* di Malaysia untuk melakukan latihan dengan Angkatan Bersenjata dari negara-negara anggota FPDA. Selain itu, Inggris juga membantu mengembangkan kualitas pertahanan melalui program pelatihan militer secara ekstensif yang menghasilkan perwira dari anggota negara-negara ASEAN yang lulus dari pendidikan pertahanan Inggris seperti Kepala Militer Singapura, Malaysia, Thailand, serta Brunei Darussalam (Wightman, 2018).

Komitmen Inggris membangun kerja sama dengan kawasan Asia Tenggara di bidang ekonomi, diplomasi, serta pertahanan dan keamanan, merupakan salah satu keberhasilan nyata pasca-Brexit. Peran Inggris sebagai *Dialogue Partner* oleh ASEAN secara diplomatik dapat membuka peluang integrasi dan partisipasi dalam forum multilateral regional. Dalam bidang pertahanan, proyeksi kekuatan militer Inggris di kawasan Asia Tenggara melalui *Carrier Strike Group* (CSG) yang dipimpin oleh kapal induk Angkatan Laut Kerajaan Inggris HMS Queen Elizabeth melalui Operasi Fortis pada tahun 2021. Melalui Operasi tersebut, Inggris menunjukkan komitmen dalam mendukung stabilitas keamanan regional, memperkuat hubungan kerja sama dengan ASEAN, serta menegaskan hak maritim berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), di tengah rivalitas Amerika Serikat dan China (Hayton, 2021). Upaya Inggris tersebut kemudian mendapatkan respons positif dari negara-negara Asia Tenggara yang memandang bahwa kehadiran Inggris dapat menjadi upaya dalam menjaga keseimbangan kekuatan di tengah ketegangan negara kekuatan besar, serta memperluas opsi strategis kawasan. Dengan hal ini, Inggris menunjukkan kemampuannya dengan berfokus pada peningkatan kapasitas maritim negara-negara kawasan, menjamin kebebasan navigasi, dan mendorong penyelesaian sengketa secara damai, khususnya dalam sengketa Laut China Selatan.

Dalam bidang ekonomi, Inggris aktif memberikan bantuan pemulihan COVID-19 di Asia Tenggara dan mendanai berbagai inisiatif ASEAN, yang dapat meningkatkan citra Inggris sebagai mitra terpercaya. Inggris dan Asia Tenggara memiliki kepentingan bersama dalam hal dukungan terhadap multilateralisme, keterbukaan, dan stabilitas regional. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa menjadi tanda berakhirnya partisipasi Inggris dalam kebijakan perdagangan kolektif Eropa dan mendorong terbentuknya kemitraan ekonomi baru secara langsung dengan negara-negara anggota ASEAN, salah satunya dengan negara kecil yaitu Brunei Darussalam.

Oleh karena itu, Inggris menunjukkan komitmennya dengan secara resmi tergabung menjadi anggota ke-12 dalam *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP) pada 15 Desember 2024. Kesepakatan perdagangan ini merupakan salah satu strategi terbesar yang dilakukan oleh Inggris pasca-Brexit, sebagai misi membangun hubungan perdagangan global setelah terlepas dari Uni Eropa. Pakta perjanjian ini mendorong Inggris untuk menerapkan peraturan perdagangan CPTPP dan penurunan tarif dengan 8 dari 11 anggota, yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Vietnam, Jepang, Selandia Baru, Chili, dan Peru (VOA Indonesia, 2024). Setelah resmi menjadi anggota CPTPP, Perdana Menteri Inggris, Sir Keir Starmer, melaksanakan pertemuan dengan Sultan Brunei Darussalam, Sultan Haji Hassanal Bolkiah, di London, untuk pembaruan perjanjian kerja sama militer yaitu *Garrison Agreement*, serta mendiskusikan rencana hubungan kerja sama di bidang ekonomi, pendidikan, dan pariwisata. Inggris juga mengatakan bahwa bergabungnya sebagai anggota CPTPP, dapat meningkatkan ekonomi kurang lebih £2 miliar per tahun dibandingkan dengan tingkat PDB yang diproyeksikan tahun 2040 (Corbett, 2024).

Adapun tantangan bagi Inggris dalam membangun hubungan kerja di kawasan Asia Tenggara adalah menyeimbangkan kepentingannya dengan nilai-nilai dan prioritas politik negara-negara ASEAN yang berkomitmen di posisi *non-alignment* dalam menghadapi dinamika persaingan kedua negara kekuatan besar di kawasan. Selain itu, beberapa negara anggota ASEAN khawatir akan keterlibatan Inggris dalam aliansi trilateral keamanan kolektif Barat dengan Australia dan Amerika Serikat melalui AUKUS, yang berpotensi meningkatkan persepsi konfrontatif dan dapat merusak hubungan China dan ASEAN yang cenderung netral dan memiliki prinsip *non-alignment* (Southgate, 2022, pp. 70-71). Di samping itu, meskipun Brexit tidak secara langsung mengubah kondisi geopolitik Eropa, hal tersebut menjadi pembelajaran penting untuk negara-negara ASEAN mengenai dinamika integrasi regional yang kurang inklusif dan elitis dapat memicu

resistensi internal. Oleh karena itu, negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi regional ASEAN, diharapkan dapat mempererat hubungan dan pendekatan yang lebih partisipatif agar integrasi regional dapat berkelanjutan dan tetap mendorong stabilitas ekonomi dan keamanan regional di Asia Tenggara (Sugiono, 2017, p. 63).

Implementasi Kerja Sama Militer Brunei Darussalam-Inggris

Brunei Darussalam memiliki hubungan historis yang berakar sejak masa Protektorat Inggris tahun 1888, dan kemudian mulai memperkuat hubungan kemitraan setelah Brunei meraih kemerdekaan pada 1 Januari 1984. Pada hari yang sama, Brunei juga resmi menjadi anggota ke-49 *Commonwealth* (negara persemakmuran), yang menandai komitmen kuat terhadap kelanjutan hubungan baik dengan Inggris. Sejak saat itu, hubungan kerja sama kedua negara terutama di bidang pertahanan dan keamanan, terus diperkuat melalui kunjungan rutin dan kolaborasi strategis, termasuk dalam pengembangan kapasitas militer di negara kecil tersebut. Negara kecil dapat diidentifikasi melalui beberapa karakteristik seperti tingkat kerentanannya, keterbatasan kapabilitas militer, ruang gerak dalam kebijakan luar negeri, kapasitas ekonomi dan industri, serta efektivitas dalam pengelolaan politik dalam negeri (Bhila, 2024, p. 205). Salah satu contoh bentuk negara kecil yang berada di kawasan Asia Tenggara yaitu Brunei Darussalam yang merupakan negara kecil yang kaya akan sumber daya, namun kapasitas militernya cenderung terbatas dalam menjaga wilayah dan kawasannya dari ancaman negara besar. Melalui hal tersebut, Brunei memperkuat strategi pertahanan dan keamanan negaranya dengan meningkatkan kapabilitas pasukan yang ada dibanding sekedar memperbanyak jumlahnya.

Oleh karena itu, untuk memperkuat pertahanan dan keamanan negaranya, Brunei menjalin kerja sama militer dengan negara mitra seperti Inggris sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas militer. Bentuk implementasi kerja sama militer kedua negara tersebut diawali dengan keberadaan *British Forces Brunei* (BFB) sejak tahun 1963, dan kemudian secara resmi ditempatkan di Brunei sejak kemerdekaan pada tahun 1984, atas permintaan Sultan Hassanal Bolkiah, yang juga merupakan lulusan *Royal Military Academy Sandhurst*, melalui perjanjian *Garrison Agreement* yang diperbarui setiap lima tahun (terakhir pada Desember 2024). Sebagai negara kecil dengan kekayaan besar dari sektor minyak dan gas tetapi memiliki kapasitas militer yang lemah, Brunei kemudian memanfaatkan sebagian dana tersebut untuk membiayai pasukan BFB yang tidak ditanggung dalam wajib pajak Inggris, sebagai bentuk strategi hubungan pertahanan.

Dalam kerja sama militer ini, tercatat sekitar 1.000 pasukan militer Inggris tergabung dalam Batalion *Light Infantry*, yaitu bagian dari *Royal Gurkha Rifles* yang ditempatkan di Brunei sebagai kekuatan pasukan tempur cadangan Inggris di kawasan Timur. Pasukan ini tidak hanya bertugas menjaga keamanan nasional dan regional, tetapi juga siap dikerahkan ke elemen lain seperti dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Inggris untuk bertugas ke luar negeri, seperti yang pernah dilakukan di Sierra Leone dan Timor Leste (Tossini, 2017).

British Forces Brunei (BFB) berbasis di Seria, Distrik Belait, yang terletak di sebuah kota kecil jauh dari Ibu Kota Brunei yaitu Bandar Seri Begawan. *Brunei Garrison* tersebar di tiga lokasi utama. Dimulai dari *Sittang Camp*, sebagai fasilitas pelatihan BFB yang dipusatkan pada *Resident Infantry Battalion* (RIB) untuk pelaksanaan pelatihan perang hutan yang akan digelar setiap tiga tahun di antara Brunei dan Folkestone, Inggris, untuk memastikan kemampuan operasional dan aklimatisasi di lingkungan tropis Brunei. Adapun hutan tropis Brunei, menjadi sarana penguasaan keterampilan infanteri, melalui latihan tembak menembak, navigasi, teknik bertahan hidup, serta pelatihan pengembangan perang hutan tingkat *Battle Group*. Kemudian di *Medicina Lines*, di mana *Jungle Warfare Division* (JWD) melaksanakan kursus seperti *Jungle Warfare Instructor Course* dan *Operational Tracking Instructor Course* untuk melatih pasukan militer Inggris dan mitra ASEAN seperti Malaysia dan Singapura, yang diselenggarakan oleh *British Army Jungle Warfare Training School* (TTB). Sementara itu, di *Tuker Lines*, menjadi markas *Garrison Headquarters* dan tempat Batalion *Royal Gurkha Rifles* bermukim (The British Army, 2023).

Selain strategi kerja sama militer, kemajuan teknologi keamanan juga salah satu pilar penting dalam aspek pertahanan negara. Brunei berinvestasi pada senjata konvensional seperti tank dan senapan, dengan pendekatan memperkuat sistem komunikasi, pengawasan, dan pertahanan siber sebagai bentuk pencegahan ancaman. Adapun efektivitas pengeluaran pertahanan Brunei tidak hanya ditentukan dengan kuantitas alutsista yang dimiliki, melainkan berfokus terhadap strategi pemanfaatan sumber daya manusia yang efisien dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit (Lee, 2023, p. 5).

Oleh karena itu, hubungan bilateral dalam bidang militer ini juga menunjukkan nilai strategis yang signifikan oleh komitmen *Global Britain* Inggris pasca-Brexit, dan sekaligus mendukung kepentingan Inggris sebagai aktor dalam stabilitas keamanan regional Asia Tenggara khususnya di tengah ketegangan sengketa Laut China Selatan.

Brunei menyediakan dukungan logistik dan finansial penuh terhadap keberadaan pasukan militer Inggris, sebagai bentuk kepercayaan yang tinggi kepada mitra pertahanan utama. Selain itu, posisi geografis Brunei yang strategis juga memungkinkan Inggris memperluas jangkauan militernya di kawasan Indo-Pasifik.

Secara keseluruhan, implementasi kerja sama militer ini menunjukkan bahwa hubungan Brunei Darussalam-Inggris tidak hanya sebatas pada warisan historis, tetapi berkembang menjadi kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Dengan hal, ini Inggris memperoleh posisi penting di Asia Tenggara, sementara Brunei sebagai negara kecil yang memiliki kapasitas militer yang lemah dan ekonomi berskala kecil, mendapat jaminan keamanan dan pelatihan militer dari salah satu kekuatan militer utama dunia yang dapat menjaga stabilitas keamanan baik secara nasional maupun regional dan tetap sejalan dengan strategi *non-alignment* negara anggota ASEAN.

5. KESIMPULAN

Kerja sama dalam bidang militer antara Brunei Darussalam dan Inggris, telah berlangsung sejak kemerdekaan Brunei tahun 1984, ditandai dengan kehadiran pangkalan militer Inggris yaitu *British Forces Brunei* (BFB), yang dapat menjadi jaminan keamanan Brunei sebagai negara kecil yang memiliki kapasitas militer, serta menjaga stabilitas regional di Asia Tenggara. Hubungan bilateral ini didukung melalui *Garrison Agreement* yang diperbarui setiap lima tahun, atas permintaan dan pendanaan Sultan Hassanal Bolkiah dari hasil kekayaan Brunei. Melalui kerja sama ini, Inggris dapat mendorong terbentuknya kemitraan dengan negara-negara anggota ASEAN sebagai strategi “*Global Britain*” pasca-Brexit. Sebagai negara kecil yang menerapkan strategi *non-alignment*, Brunei dapat menyeimbangkan hubungan bilateral dalam aspek pertahanan dengan Inggris, dan tetap menjalin hubungan kerja sama ekonomi yang erat dengan China sebagai investor utama untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur Brunei di tengah rivalitas negara kekuatan besar dan ketegangan sengketa Laut China Selatan. Oleh karena itu, tulisan ini menggambarkan peran strategis negara kecil dalam dinamika geopolitik yang bersaing, serta mengkaji kebijakan luar negeri Brunei dan Inggris melalui kerja sama di bidang militer dan implikasinya dalam memperkuat stabilitas keamanan secara nasional dan regional di Asia Tenggara.

DAFTAR REFERENSI

- Asia Pacific Foundation of Canada. (2020, May 13). *Brunei's economic ties with China increase*. <https://www.asiapacific.ca/asia-watch/bruneis-economic-ties-china-increase>
- Baldacchino, G. (2020). *Small states: Concepts and theories*. Edward Elgar Publishing.
- Bandial, A. (2017, October 16). From protectorate to partnership: 50 years of Brunei-UK ties. *The Scoop*. <https://thescoop.co/2017/10/10/protectorate-partnership-50-years-brunei-uk-ties/>
- Bhila, I. (2024). Strained missions: The diplomatic dilemmas of small states from the Global South in the area of autonomous weapons systems. *Small States & Territories*, 7(1), 203–220.
- Corbett, H. (2024, December 19). Sultan of Brunei visits Starmer at No 10 to renew army garrison deal. *The Standard*. <https://www.standard.co.uk/news/politics/brunei-downing-street-prime-minister-gdp-white-b1201002.html>
- Department of Economic Planning and Statistics. (2024). *Laporan anggaran penduduk*. Ministry of Finance and Economy Brunei Darussalam.
- Druce, S. C. (2019). The road to Brunei's economic diversification: Contemporary Brunei-China relations. In A. Lim & F. Cibulka (Eds.), *China and Southeast Asia in the Xi Jinping era* (pp. 139–153). Lexington Books.
- Efremova, K. (2019). Small states in great power politics: Understanding the “buffer effect.” *Central European Journal of International and Security Studies*, 13(1), 100–121.
- Febrina, F., et al. (2024). Studi peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara. *Aeterna*, 1(1), 1–7.
- Graham, E. (2024, March 7). Advice to ASEAN: ‘N’ should equal non-aligned, not neutral. *ASPI The Strategist*. <https://www.aspistrategist.org.au/advice-to-asean-n-should-equal-non-aligned-not-neutral/>
- Haacke, J., & Breen, J. H. (2020, February 16). After Brexit, Britain's future engagement in Southeast Asia is far from certain. *South China Morning Post*. <https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3050719/after-brexit-britains-future-engagement-southeast-asia-far>
- Hayton, B. (2021, July). The carrier strike group in the South China Sea. *Council on Geostrategy*. <https://www.geostrategy.org.uk/app/uploads/2021/07/GPE03-27072021.pdf>
- Izzudin, M. (2021). Brunei Darussalam in 2020: Enduring stability of a small monarchical state in a turbulent year. *Southeast Asian Affairs*, 55–70.
- Kuok, L. (2021, August 11). From withdrawal to Indo-Pacific ‘tilt’: Southeast Asia welcomes enhanced British security presence. *IISS: Online Analysis*. <https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/2021/08/southeast-asia-british-security-presence-indo-pacific-tilt/>
- Lee, B. T. (2023). Power projection and counter-terrorism: Strategies for small states like Brunei Darussalam. *Journal of Terrorism Studies*, 5(2).

- Lim, G., Hoon, C.-Y., & Zhao, K. (2023). Foreign investment, state capitalism, and national development in Borneo: Rethinking Brunei-China economic relations. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 42(1), 243–263.
- Lupel, A. P. (2024, September). Small states and the multilateral system: Transforming global governance for a better future. *International Peace Institute*. <https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2024/09/Small-States-and-the-Multilateral-System-web.pdf>
- Prime Minister's Office. (2024, December 19). PM meeting with His Majesty the Sultan of Brunei: 19 December 2024. *GOV.UK*. <https://www.gov.uk/government/news/pm-meeting-with-his-majesty-the-sultan-of-brunei-19-december-2024>
- Putra, B. A. (2020). Comprehending Brunei Darussalam's vanishing claims in the South China Sea: China's exertion of economic power and the influence of elite perception. *Cogent Social Sciences*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1834745>
- Roberts, C. B. (2016). Brunei Darussalam: Challenging stability. *Southeast Asian Affairs*, 95–106.
- Southgate, L. (2022). UK–ASEAN relations and the balance of power in Southeast Asia. *The RUSI Journal*, 167(6–7), 64–71.
- Storey, I., & Hoang, T. H. (2021, October 1). 'Global Britain' and Southeast Asia: Progress and prospects. *ISEAS-Yusof Ishak Institute*. <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-130-global-britain-and-southeast-asia-progress-and-prospects-by-ian-storey-and-hoang-thi-ha/>
- Sugiono, M. (2017). Brexit, integrasi Eropa, dan regionalisme ASEAN. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, (29), 57–65.
- Súilleabháin, A. Ó. (2014). *Small states at the United Nations: Diverse perspectives, shared opportunities*. International Peace Institute.
- The British Army. (2023). *Brunei*. <https://www.army.mod.uk/learn-and-explore/global-operations/brunei/>
- Tossini, J. V. (2017, April 18). The UK in Southeast Asia – Brunei and the Five Power Defence Arrangements. *GEDES*. <https://gedes-unesp.org/the-uk-in-southeast-asia-brunei-and-the-five-power-defence-arrangements/#:~:text=The%20Sultan%2C%20equipped%20with%20substantial,half way%20between%20Tanzania%20and%20Indonesia.>
- Venkatachalam, S., et al. (2022). ASEAN's pivotal role for regional stability: A realist perspective within the context of US-China rivalry in Southeast Asia. *JATI: Journal of Southeast Asian Studies*, 28(2), 1–18.
- VOA Indonesia. (2024, December 16). Inggris resmi jadi anggota perjanjian perdagangan trans-Pasifik. <https://www.voaindonesia.com/a/inggris-resmi-jadi-anggota-perjanjian-perdagangan-trans-pasifik/7902483.html>
- Wightman, S. (2018, July 26). Britain and ASEAN: Strengthening ties post-Brexit. *RSIS Commentary*. <https://rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2018/07/CO18127.pdf>